

PPS Pemilu Serentak 2024 Dilantik

PURWOREJO (KR) - Sebanyak 1.482 panitia pemungutan suara (PPS) desa dan kelurahan untuk pelaksanaan Pemilu Serentak 2024, dilantik di Alun-alun Purworejo, Selasa (24/1). PPS akan dihadapkan dengan tugas pertamanya yakni melaksanakan pemutakhiran data pemilih di desa. Pengambilan sumpah dan janji anggota PPS itu dilakukan secara serentak untuk 494 desa dan kelurahan di Kabupaten Purworejo. "Kami laksanakan di Alun-alun Purworejo karena mengingat jumlahnya yang cukup banyak," ungkap Ketua KPU Kabupaten Purworejo Dulrokhim, usai pelantikan.

Menurutnya, PPS akan langsung bertugas setelah pelantikan itu. Tugas pertama mereka, katanya, adalah membentuk petugas pemutakhiran data pemilih (pantarih) di desa. Pantarih akan membantu KPU dalam menyusun daftar pemilih dengan cara pengecekan langsung dari rumah ke rumah. "Mereka tugasnya mencocokkan data pemilih yang ada di kami, kemudian disesuaikan dengan data di lapangan," tuturnya.

PPS akan bertugas hingga pelaksanaan Pemilu Serentak 2024. KPU direncanakan akan melakukan evaluasi kinerja setelah pelaksanaan pemilu serentak dan kemudian melakukan pengangkatan kembali para PPS tersebut. Jumlah PPS terpilih di setiap desa sebanyak tiga orang. "Namun, aturannya ada tiga calon pengganti yang juga dipilih berdasarkan skoring penilaian. Tujuannya, apabila ada PPS yang berhalangan tetap, bisa diganti oleh PPS pengganti di bawahnya," tuturnya. **(Jas)-f**



KR-Jarot Sarwosambodo

Pengambilan sumpah PPS Kabupaten Purworejo.

Pendaftaran PKD di Purworejo Diperpanjang

PURWOREJO (KR) - Panitia pengawas pemilu (Panwaslu) di sepuluh kecamatan Kabupaten Purworejo memperpanjang masa pendaftaran pengawas kelurahan/desa (PKD) di 29 desa wilayahnya. Perpanjangan dilakukan karena jumlah pendaftar PKD belum memenuhi jumlah minimal kebutuhan serta belum terpenuhinya pendaftar perempuan.

Perpanjangan pendaftaran PKD mulai dilakukan pada Selasa (24/1) hingga Kamis (26/1). "Kelompok kerja (pokja) yang dibentuk di kecamatan yang jumlah pendaftarnya belum terpenuhi sudah melakukan pleno dan mengumumkan perpanjangan pendaftaran," kata Koordinator Divisi SDM, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan Bawaslu Purworejo, Abdul Azis, Senin (23/1). Regulasi mengatur apabila jumlah pendaftar PKD minimal dua kali kebutuhan. Mengingat kebutuhan PKD hanya satu orang, katanya, maka minimal pendaftar harus dua.

Namun, aturan juga menyebut adanya afirmasi terhadap keterwakilan perempuan, di mana harus ada wanita yang mendaftar di setiap desa. "Kalau satu desa tidak ada pendaftar wanita, maka harus diperpanjang dan hanya dikhususnya untuk pendaftar wanita saja," terangnya.

Desa-desa yang dilakukan perpanjangan antara lain Kalinongko (Loano), Cacaban Kidul (Bener), Pilipir (Purworejo), Kaliwungu dan Giyombong (Bruno) Rasukan dan Tunjungan (Ngombol), Grantung dan Dewi (Bayan), Somongari dan Sumowono (Kaligesing), Aglik dan Rowodadi (Grabag), Kendalrejo, Sambeng, Megulunglor, Brengkol, Kaligondang, Kaligintung (Pituruh), Kentengrejo, Plandi, Bongkot, Gesing, Karanganyar, Sumbersari, Sumberrejo, Sukomanah, Blendung, dan Geparang (Purwodadi).

Abdul Azis berharap masyarakat yang memenuhi syarat mau mendaftar sebagai PKD dengan menghubungi sekretariat panwascam. "PKD itu bagian dari pengabdian demi menjaga demokrasi lima tahunan ini berjalan dengan baik. Tentunya, pemilu yang berkualitas dan bermartabat akan menghasilkan pemimpin bangsa yang amanah," tegasnya. **(Jas)-f**

Puluhan Pesantren Berpotensi Jadi Lokasi Khusus

MAGELANG (KR) - Jelang Pemilu 2024, sedikitnya 70-an pesantren di Kabupaten Magelang berpotensi mendapatkan pelayanan pemungutan suara khusus. Potensi ini muncul dari asesmen yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Magelang. "Potensi ini muncul setelah kami (Bawaslu Kabupaten Magelang) dari tanggal 15 Desember 2022 sampai 19 Januari 2023 melakukan asesmen," kata Sumarni Aini Ch, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat, Selasa (24/1).

Aini menjelaskan pihaknya selama satu bulan lebih melakukan asesmen terhadap potensi adanya lokasi khusus pada Pemilu 2024 mendatang. Lokasi asesmen terdiri dari 5 unsur meliputi, pondok pesantren, lembaga pendidikan berasrama (boarding school), panti sosial, rumah sakit, dan tempat relokasi bencana. Selama asesmen, Tim Bawaslu Kabupaten Magelang dan Panwaslucam berkoordinasi dan mendatangi langsung pihak-pihak yang menjadi sasaran lokasi asesmen seperti, kepala Kemenag Kabupaten Magelang serta pimpinan/pengasuh pondok pesantren.

"Kami datang secara langsung dan memberikan kuisisioner kepada pengasuh ponpes yang berisi pertanyaan perkiraan jumlah santri dan tenaga pendidiknya (ustadz), perkiraan jumlah pemilih, skema memilih pada tahun 2019 serta data perkiraan santri yang tidak dapat memilih pada tahun 2019," kata Aini. Menurutny, hasil asesmen menyebutkan, santri yang tidak dapat memilih karena alasan tidak bisa pulang sebab berasal dari luar Pulau Jawa.

Disebutkan Bawaslu Kabupaten Magelang juga berkoordinasi dengan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Magelang Edi Wasono, S.H. Dalam koordinasi inididapati wilayah Kawasan Rawan Bencana 3 (kategori sangat rawan) yang perlu mendapat perhatian bilamana terjadi bencana terutama erupsi Gunung Merapi mengigat tidak sedikit warga yang tinggal dan menetap di kawasan Gunung Merapi. **(Bag)-f**

KPU Klaten Lantik 1.203 Anggota PPS

KLATEN (KR) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Klaten melantik sebanyak 1.203 anggota panitia pemungutan suara (PPS) untuk Pemilu 2024. Acara berlangsung di Grha Bung Karno, Selasa (24/1).

Bupati Klaten Sri Mulyani, yang hadir dalam acara tersebut mengemukakan, PPS Pemilu 2024 yang telah dilantik agar menjalankan tugas sesuai aturan. Ia berharap tahapan-tahapan Pemilu dilaksanakan dengan baik, sehingga Pemilu 2024 berjalan dengan sukses, kondusif, dan menghasilkan pemimpin yang berkualitas.

Ketua KPU Klaten Kartika Sari Handayani mengemukakan, sebanyak 1.203 anggota yang dilantik tersebut, berasal dari setiap desa/kelurahan, masing-masing sebanyak 3 orang anggota PPS. Proses rekrutmen berlangsung sejak 2 Desember 2022. Mereka bukan usulan dari kepala desa/lurah, melainkan mendaftar melalui aplikasi siakba.-kpu.go.id. Pendaftar sekitar 3.000 orang lebih, selanjutnya diverifikasi secara administrasi. Mereka yang lolos administrasi bisa lanjut mengikuti test tertulis di masing-masing kecamatan, namun kewenangan tetap berada di KPU.

Kartika menjelaskan, jumlah yang mengikuti test tertulis sekitar 2.900, namun yang mengikuti wawancara hanya sebanyak 2.144. Selanjutnya dibuat pemeringkatan ranking 1 sampai 6.

Diumumkan, untuk peringkat 1 sampai 3 menjadi anggota PPS terpilih, dan urutan 4 sampai 6 menjadi calon pengganti antar waktu (PAW) apabila nanti ada anggota terpilih yang meninggal dunia, berhalangan hadir atau mengundurkan diri.

Nilai hasil test mereka tidak diumumkan langsung melainkan sudah ada di siakba masing-masing.

"Masyarakat yang ingin mengetahui nilainya, bisa datang ke KPU nanti kita buatkan siakba. Jadi prosesnya itu, setelah test tertulis, nilainya dimasukkan ke dalam aplikasi siakba. Nilai hasil wawancara juga masuk ke siakba langsung meranking, lalu hasil peringkat itu kita

umumkan," jelas Kartika.

Untuk PAW, ada beberapa desa/kelurahan yang pendaftarnya hanya 3 atau 4 orang. Sehubungan hal itu KPU melakukan perpanjangan pendaftaran hingga dua kali.

Hal ini dikarenakan untuk desa/kelurahan tertentu antusiasnya sangat minim. Masa kerja anggota PPS tersebut, dari 24 Januari 2023 hingga 4 April 2024, dengan gaji sekitar Rp 1,5 juta. Latar belakang ada yang dari perangkat desa, lulusan universitas, incumbant PPS.

"Jadi ada dari anak muda, dan keterwakilan perempuan terpenuhi sebanyak 31,34 persen," tambah Kartika Sari. **(Sit)-f**



KR-Sri Warsiti

Bupati Klaten, Ketua KPU Klaten, dan anggota PPS.

Suara Masyarakat Cermin Baik Buruknya Layanan Publik

SEMARANG (KR) - Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, mengatakan indikator administratif jangan dijadikan sebagai standar untuk menilai kualitas pelayanan publik. Menurut Ganjar, baik atau buruknya pelayanan publik tercermin dari suara masyarakat.

Demikian dikatakan Ganjar Pranowo kepada wartawan di Semarang, Senin (23/1). Ganjar Pranowo mengatakan senang, karena dari Ombudsman RI (ORI) menilai dari luar, dan Pemprov Jateng mencoba melihat daerah-daerah yang dulu layanan publiknya merah sekarang sudah bisa hijau.

Mantan anggota DPR RI itu mengapresiasi para kepala daerah yang telah melakukan perbaikan pelayanan publiknya. Ganjar mengatakan, indikasi pe-

nilaian pelayanan publik sudah baik atau belum, dapat dinilai dari suara masyarakat.

"Semakin banyak suara yang keluar di masyarakat, itu berarti layanan dari instansi tersebut buruk, gitu saja. Tapi kalau pakai indikator-indikator yang sifatnya administratif tentu tidak akan terasa oleh masyarakat," tutur Ganjar Pranowo.

Selama hampir sepuluh tahun memimpin, keluhan yang muncul dari masyarakat seringkali ter-

kait tiga sektor, yaitu pendidikan, layanan kesehatan dan sosial. Itulah ekspektasi publik untuk kemudian dia bisa mendapatkan layanan terbaik.

Dengan demikian kehadiran Ombudsman RI untuk memberikan penilaian menjadi motivasi tambahan bagi pemerintah untuk perbaikan.

"Ada lima kabupaten kota terbaik. Dii masing-masing tempat tersebut bisa dirujuk dari sebelumnya apakah mereka melakukan perbaikan atau tidak, dan ternyata ada perbaikan. Jadi dengan mendengarkan suara rakyat, perbaikan bisa dilakukan," ujar Ganjar Pranowo.

Ke depan Ganjar berharap pemerintah kabupaten kota yang ni-

lainya sudah baik, bisa berbagi pengalaman. Diantara kepala daerah bisa melakukan sharing, sehingga mereka bisa lebih enak dalam melakukan perbaikan sistem administrasi pemerintahan. Tidak perlu memikirkan bagaimana caranya biar dapat yang baru dan diperbaiki. Contoh saja dari yang sudah ada itu akan lebih cepat.

Pimpinan Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng mengapresiasi tiga dinas di Pemprov Jateng yang setahun terakhir dinilainya banyak melakukan perbaikan standar pelayanan.

Tiga dinas tersebut yakni Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Dinas Sosial. **(Bdi)-f**

Anakan King Kobra Masuk ke Dalam Rumah

BOYOLALI (KR) - Warga di Dukuh Alasmalang, Kelurahan Winong, Kecamatan Boyolali Kota digegerkan dengan munculnya tiga ekor anak ular jenis King Kobra dipermukiman. Satu ekor berhasil ditangkap, sedangkan dua ekor lainnya luput dari tangkapan warga.

Sejumlah warga sudah berupaya memburu King Kobra lainnya, dengan menyisir setiap sudut rumah dan semak-semak, namun tidak berhasil. Sebelumnya, ular berbisa ini diketahui pertama kali oleh pemilik rumah yang curiga ayam miliknya mematak benda panjang di halaman rumah, saat didekati ternyata King Kobra.

"Masih kecil, panjangnya sekitar 20 Cm lebih, bagian kepala ular dapat mengembang dan melebar seperti sendok. Warna kulitnya hitam mengkilap, jumlahnya tidak hanya satu, bahkan saat diperhatikan jumlahnya ada tiga ekor," ujar Ari, Senin (23/1).

Munculnya ular berbisa ini merupakan kejadian yang pertama kali. Diduga ular berasal dari semak-semak di sekira rumah atau sungai yang letaknya tiak jauh dari permukiman. Hingga saat ini, anakan ular king kobra hasil tangkapan masih disimpan dan menjadi tontonan warga.

Dengan kemunculan ular jenis king kobra ini warga mengaku resah. "Karena beberapa anak ular sudah terlihat sehingga dipastikan ada induknya di sekitar permukiman warga," pungkasnya. **(R-3)-f**

yakin bahwa inovasi dari Kepala Desa/Dukuh Desa akan lebih maju yang nantinya akan memberikan nilai positif pada masyarakat dari sisi perekonomian dan tenaga kerja," ujarnya. Hingga sampai saat ini jumlah desa wisata di Boyolali berjumlah 45 desa wisata. Sedangkan objek wisata air terdapat beberapa tempat yang tersebar di sejumlah kecamatan, yakni Banyudono, Sawit, Ngemplak, Klego, dan kecamatan Boyolali Kota.

Kepala Desa Dukuh Sartono mengatakan, pengembangan desa wisata ini guna meningkatkan perekonomian warga masyarakat melalui UMKM warga. "Ini untuk mengembangkan UMKM warga, dengan begitu ekonomi warga akan meningkat," katanya.

Desa wisata ini, lanjut dia, yang akan dikembangkan mulai dari kuliner, perikanan serta permainan anak-anak. "Nanti rencananya digratiskan beberapa hari, kemudian baru dikomersilkan. Ya, tujuannya untuk menambah pendapatan asli daerah (PAD) desa Dukuh," jelasnya. **(R-3)-f**

Umbul Peceren, Destinasi Wisata Baru

BOYOLALI (KR) - Geliat destinasi wisata di Kota Susu Boyolali mulai bermunculan, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Boyolali meresmikan objek wisata Umbul Peceren yang berada di Desa Dukuh, Kecamatan Banyudono diharapkan menjadi magnet bagi masyarakat.

Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Boyolali Supana, mengatakan, pemerintah desa Dukuh mengandeng BUM-

Des setempat untuk mengembangkan destinasi wisata baru. Dimana, lokasi wisata ini cukup strategis yakni berdekatan dengan objek wisata Pengging. "Bila dilihat lokasinya cukup strategis, dan persis berdekatan dengan wisata Umbul Pengging, atau belakang Bakaidesa," kata Supaya, Senin (23/1).

Dengan adanya wisata baru ini, Supana berharap bisa sebagai penyangga langsung wisata Umbul Ngabean serta kawasan Yosodipuro. "Saya

ingin bahwa inovasi dari Kepala Desa/Dukuh Desa akan lebih maju yang nantinya akan memberikan nilai positif pada masyarakat dari sisi perekonomian dan tenaga kerja," ujarnya. Hingga sampai saat ini jumlah desa wisata di Boyolali berjumlah 45 desa wisata. Sedangkan objek wisata air terdapat beberapa tempat yang tersebar di sejumlah kecamatan, yakni Banyudono, Sawit, Ngemplak, Klego, dan kecamatan Boyolali Kota.

Kepala Desa Dukuh Sartono mengatakan, pengembangan desa wisata ini guna meningkatkan perekonomian warga masyarakat melalui UMKM warga. "Ini untuk mengembangkan UMKM warga, dengan begitu ekonomi warga akan meningkat," katanya.

Desa wisata ini, lanjut dia, yang akan dikembangkan mulai dari kuliner, perikanan serta permainan anak-anak. "Nanti rencananya digratiskan beberapa hari, kemudian baru dikomersilkan. Ya, tujuannya untuk menambah pendapatan asli daerah (PAD) desa Dukuh," jelasnya. **(R-3)-f**



KR-Mulyawan

Anak-anak berenang di Umbul Peceren di Desa Dukuh, Kecamatan Banyudono.

Atasi Stunting dengan 'Isi Piringku Kaya Protein Hewani'

SEMARANG (KR) - Saat ini Indonesia dihadapkan pada masalah stunting cukup tinggi dibandingkan negara-negara ASEAN. Hasil SSGI 2021, menunjukkan jumlah rata-rata nasional balita stunting sebesar 24,4% . Angka tersebut ditargetkan turun menjadi 14% tahun 2024. Hal ini membuat pemerintah mengajak berbagai sektor bekerjasama melakukan gerakan mempercepat penurunan angka stunting.

"Stunting berdampak buruk bagi bangsa. Generasi penerus bangsa yang mengalami stunting akan terganggu perkembangan otak yang berimbas pada penurunan kecerdasan, gangguan pertumbuhan fisik, dan gangguan metabolisme dalam tubuh. Bahkan dampak jangka panjang berupa penurunan kemampuan kognitif, penurunan kekebalan tubuh, serta munculnya penyakit-penyakit yang berkaitan dengan syndrome metabolic pada saat dewasa seperti diabetes melitus, obesitas, penyakit jantung, dan lain-lain" ujar Hersanti Sulistyaningrum SGz MGz, dosen Prodi Gizi Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan (Fikkes) Universitas Muhammadiyah Semarang (Unimus) pada diskusi terbatas di kampus setempat, Selasa (24/1).

Menurutnya, kualitas makanan yang rendah dan cara pemberian makanan yang tidak adekuat merupakan salah satu penyebab stunting. Kualitas makanan rendah dapat berupa kualitas mikronutrien yang rendah, keragaman jenis makanan yang dikonsumsi dan sumber makanan hewani yang rendah, makanan tidak mengandung gizi yang cukup, dan makanan komplementer yang mengandung energi rendah.

"Salah satu upaya percepatan penurunan angka stunting di Indonesia yang dilakukan peme-



KR-Istimewa

Hersanti Sulistyaningrum

rintah dengan menggalakkan peningkatan konsumsi protein hewani di masyarakat melalui pengenalan slogan "Isi Piringku Kaya Protein Hewani" pada peringatan Hari Gizi Nasional ke-63 tahun 2023 ini" tambah Hersanti

Sulistyaningrum SGz MGz.

Konsumsi protein hewani yang masih rendah seperti konsumsi ikan yang baru mencapai 55,37 kg, daging ayam 6 kg, dan daging sapi 0,5 kg per kapita per tahun menjadi perhatian banyak pihak sebab konsumsi protein hewani yang tinggi pada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita dapat membantu mencegah terjadinya stunting.

"Isi Piringku" yang sering dikampanyekan secara umum menggambarkan porsi makanan dalam satu piring yang terdiri dari 30% makanan pokok, 20% lauk pauk, 30% sayur, dan 20% buah. Lauk pauk terdiri lauk hewani dan lauk nabati. Melalui slogan 'Isi Piringku Kaya Protein Hewani' diharapkan terdapat lauk hewani setiap makan makanan utama. Sebab lauk hewani kaya akan kandungan protein, mineral seperti zat besi, dan vitamin yang mudah diserap tubuh. **(Sgi)-f**